

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENEGAKAN HUKUM
DIBIDANG TERA UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN**



Oleh:

SHAFIRIA ISLAMIATI

1500024173

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

JOURNAL

**ANALYSIS ON ROLE AND RESPONSIBILITY OF DEPARTMENT OF INDUSTRY
AND TRADE OF GUNUNGKIDUL REGENCY IN LAW ENFORCEMENT IN
RESET FIELD TO PROTECT CONSUMERS**



Written by:

SHAFIRIA ISLAMIATI

1500024173

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal Student**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

ANALISIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG TERA UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN

Shafiria Islamiati

ABSTRAK

Ekonomi memiliki peranan penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif. Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam mengatur kegiatan dalam bidang perekonomian di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui: (i) peran dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penegakan hukum dibidang tera untuk melindungi konsumen, (ii) kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penegakan hukum dibidang tera untuk melindungi konsumen.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data primer dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan dokumen yang dikumpulkan dan dikaji untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang diteliti.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sudah dilakukan secara optimal melalui peran pengawasan terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui sosialisasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan petugas penera dari UPT Kemetrolagian Bantul melakukan pengawasan setahun sekali di 36 pasar yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Ketidakoptimalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan pengawasan dan pembinaan karena kurang kesadaran pelaku usaha dalam melakukan tera ulang secara berkala.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Gunungkidul, Konsumen.

ANALYSIS ON ROLE AND RESPONSIBILITY OF DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF GUNUNGKIDUL REGENCY IN LAW ENFORCEMENT IN RESET FIELD TO PROTECT CONSUMERS

Shafiria Islamiati

ABSTRACT

Economics has a vital role in life, both individually and collectively. The establishment of the Department of Industry and Trade functions as a policymaker in regulating economic activities in Indonesia. Consumer protection is an effort that guarantees legal certainty to protect the consumer. The objective of this research is to understand : (i) the role and responsibility of Department of Industry and Trade of Gunungkidul regency in law enforcement in reset field to protecting consumers, (ii) Obstacles faced by Department of Industry and Trade of Gunungkidul regency in law enforcement in reset field to protecting consumers.

The type of this research is qualitative descriptive. Data used in this research are primary data, secondary data and tertiary data. The primary data collection method is by interview, while secondary data collected by documents collection and reviewed to answer the problems in this research.

The result of this research shows that the Department of Industry and Trade of Gunungkidul Regency in providing legal protection to consumers had been carried out optimally through the role of supervision of measuring devices, weighing and equipment and coaching to businesses through socialization. The Department of Industry and Trade, in collaboration with officers from the Bantul Technical Implementation Unit (UPT) of Metrology, conducts surveillance once a year in 36 markets in Gunungkidul Regency. Department of Industry and Trade of Gunungkidul Regency is not optimal in carrying out supervision and coaching because there is a lack of awareness of business actors in conducting regular re-measurements.

Keywords: Responsibility, Gunungkidul, Consumer.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif. Setiap individu memerlukan ekonomi yang memadai untuk memberlangsungkan hidupnya di dunia ini termasuk keperluan sandang, papan, pangan dan tempat tinggal. Tanpa adanya perekonomian semua itu tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat di dunia ini (Mujiatun, 2014: 91).

Sejarah perlindungan konsumen awal di Indonesia belum dapat ditentukan karena belum ada pihak yang melakukan kecurangan dalam melakukan perdagangan di sektor ekonomi. Menurut NHT Siahaan mengkaji perkembangan mengenai perlindungan di Indonesia mengalami beberapa tahap perkembangan. Berdasarkan rangkai waktu di negara kita, perlindungan konsumen lebih banyak didekati pada aspek perkembangan produk hukum yang ada (Rosmawati, 2018 :14).

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup yang semakin tinggi, perkembangan perdagangan barang dan/atau jasa semakin hari semakin meluas terlebih lagi dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat tentang informasi pun semakin tinggi. Ini menyebabkan bahwa semakin banyaknya barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Keadaan seperti ini faktanya telah memberi keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen barang dan/atau jasa terpenuhi. Selain itu juga konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai apa yang mereka butuhkan

dan inginkan (Ayu, 2013: 1). Selain keuntungan yang semakin maju terkadang ada pula kegiatan yang tidak diinginkan dilakukan oleh pelaku usaha. Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen harus ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Upaya hukum sangat penting diberikan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang seharusnya diterima oleh konsumen, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan terhadap konsumen dengan dibentuknya undang-undang yang secara tegas dapat melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di dalam pergaulan hidup masyarakat (Dewi, 2015: 3).

Perkembangan peraturan untuk melindungi konsumen setiap zaman mengalami perubahan. Masa zaman Hindia Belanda upaya perlindungan konsumen tertuang dalam pasal-pasal dari berbagai peraturan yang ada walau tidak secara eksplisit menyebutkan terkait konsumen dan pelaku usaha. Pada zaman sekarang bisa kita lihat di peraturan yang sudah dibuat, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Rosmawati, 2018: 15).

Indonesia adalah negara hukum yang sejahtera memiliki cita-cita luhur sebagaimana dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk konkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi seluruh warga negara dari tindakan yang tidak baik dan dapat merugikan warganya. Hukum perlindungan

konsumen dibuat demi melindungi warga negara (konsumen) dari perbuatan pelaku yang tidak bertanggungjawab baik didalam maupun diluar negeri. Hukum perlindungan konsumen adalah upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dan negara untuk melindungi konsumen sesuai amanah dari konsepsi negara yang termuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Mansyur dan Rahman, 2015: 3).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan tentang keberadaan hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum nasional tidak bisa diragukan lagi. Kedudukan hukum perlindungan konsumen diakui sebagai cabang hukum tersendiri dari hukum ekonomi karena konsumen sebagai objek dalam kegiatan perekonomian. Persoalan perilaku konsumen saat ini bukan hanya jadi sorotan dalam bidang ekonomi saja namun bidang hukum perlu meninjau hal ini.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan yang dijadikan untuk payung hukum dan sekaligus menggabungkan aturan lain tentang konsumen yang dapat memperkuat penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini bukan awal atau akhir dari aturan yang mengatur perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, kemungkinan aturan baru yang memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen dibentuk juga bisa karena sesuai perkembangan zaman (Nurhalis, 2015: 527).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melihat adanya perlakuan pelaku usaha yang terjadi di Indonesia mengalami kesenjangan padahal sudah jelas

perlindungan konsumen sudah diatur di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Analisis peran dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penegakan hukum dibidang tera untuk melindungi konsumen*”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penegakan hukum dibidang tera untuk melindungi konsumen?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penegakan hukum dibidang tera untuk melindungi konsumen?

C. PEMBAHASAN

1. Peran Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian. Segi hukum, pengawasan dimaknai sebagai penilaian sah atau tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum (Koencoro, 2004: 74).

Peran pengawasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 30 yang dimaksud pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terhadap kegiatan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. Pengawasan tersebut dilakukan demi memenuhi hak konsumen yang diatur dalam UUPK Pasal 4, yaitu hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada Bab III juga menyebutkan beberapa hal terkait pengawasan. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini telah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu diatur dalam UUPK Pasal 7 yang berbunyi “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Peran pengawasan bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum berjalan secara maksimal. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 21 dimana dijelaskan beberapa tugas dari seksi perlindungan konsumen belum dijalankan dengan semestinya, seperti tugas melaksanakan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Kegiatan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya belum secara maksimal dijalankan karena kegiatan ini baru dilaksanakan dua tahun terakhir ini.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul melalui petugas penera melakukan pengawasan tera ulang alat ukur, timbang dan perlengkapannya seperti: timbangan pasar digital dan manual, gelas ukur dan meteran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, timbangan posyandu, timbangan perusahaan gaplek dan perusahaan batu dan meteran PDAM dan listrik. Petugas penera melihat tingkat akurat alat ukur dimasing-masing timbangan yang digunakan pelaku usaha, sebagaimana tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul apabila terdapat alat yang tidak memenuhi standar UTTP maka pelaku usaha diberikan teguran melalui laporan hingga sanksi administratif. Kewajiban pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam kegiatan perdagangan.

Jangka waktu tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang dilakukan petugas penera dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya. Jangka waktu ini ditentukan karena masa berlakunya alat ukur tera itu sendiri habis setelah satu tahun, yang berarti alat ukur tersebut apabila sudah melewati waktu setahun maka tingkat akuratnya sudah berkurang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan hanya mengatur perlindungan dalam kegiatan perdagangan saja namun pemenuhan hak konsumen yang harus diberikan pelaku usaha juga sangat diperhatikan dalam melindungi konsumen. Peran yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul telah memenuhi beberapa hak konsumen yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Melihat peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tidak hanya hak konsumen saja yang dilindungi tetapi hak

pelaku usaha dengan cara membuat pelaku usaha sadar akan kewajibannya yang harus dijalankan. Kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi seperti:

- a) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pasal 7 UUPK menyebutkan beberapa kewajiban yang harus pelaku usaha penuhi, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul belum bisa sepenuhnya membawa pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gunungkidul dalam kewajiban yang tertulis di Undang-Undang tersebut.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan perannya berlandaskan pada asas yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Asas manfaat, dimana upaya melakukan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara menyeluruh;
- b) Asas keadilan, agar partisipasi masyarakat dapat terwujud secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

Peran pengawasan yang berkaitan dengan asas yang ada pada UUPK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pengawasan sesuai asas manfaat yaitu memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dalam kegiatan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya agar antara pelaku usaha dan konsumen terpenuhi haknya secara menyeluruh.

Asas keadilan yang dimaksud adalah dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan peran pengawasan tidak hanya mementingkan konsumen saja namun pelaku usaha juga, dalam UUPK juga tidak hanya mengatur konsumen saja melainkan pelaku usaha. Arahan yang diberikan dalam UUPK terkait pelaku usaha dan konsumen dibuat agar berjalan sesuai norma yang berlaku demi terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Asas keadilan juga dijelaskan di Pancasila yaitu sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjelaskan keadilan harus ditegakkan tidak memandang sebagai apa dan bagaimana, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang harus diberikan keadilan sebenarnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul selain berlandaskan asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peran pengawasannya juga berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2004. AAUPB membagi asasnya menjadi 9 (sembilan) macam, namun yang berkaitan dengan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya beberapa, yaitu:

- a) Asas kepastian hukum, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul menjalankan perannya sesuai peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul;
- b) Asas kemanfaatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mengutamakan kepentingan antara pelaku usaha dengan

konsumen untuk kepentingan perdagangan dan keduanya sama-sama mendapatkan manfaat tanpa ada pihak yang dirugikan;

- c) Asas ketidakberpihakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak hanya mementingkan hak konsumen namun hak pelaku usaha juga diperhatikan karena pelaku usaha dan konsumen sama-sama masyarakat yang harus dilindungi haknya.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ada 3 elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a) Struktur hukum (*legal structure*);
- b) Substansi hukum (*legal substance*);
- c) Budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, sistem tersebut secara struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Substansi hukum merupakan elemen lainnya yang tersusun dari peraturan yang ada dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berlaku. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah satu elemen yang kuat terhadap sikap dan nilai sosial (Friedman, 2017: 6-17).

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul secara sistem hukum masuk dalam substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yang dimaksud dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tersebut karena peran mengawasi dalam kegiatan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan secara detail mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam mengawasi kegiatan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang dilaksanakan petugas penera.

2. Peran Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi (Mathis, 2002: 112). Tangdilintin pun mengatakan pembinaan akan menjadi suatu “*empowerment*” atau pemberdayaan dengan maksud menyadarkan dan membebaskan, memekarkan potensi dan membangun kepercayaan, menumbuhkan kesadaran kritis dan bertanggungjawab, mendorong mereka berperan sosial aktif (Tangdilintin: 2008: 61).

Unsur-unsur pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul kepada pelaku usaha terkait kegiatan tera ulang adalah pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa manfaat melakukan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya dalam kegiatan perdagangan. Pembinaan melalui pendidikan sering kali dijadikan satu dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha dan menjalankan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang baik. Peran pembinaan juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tidak hanya melakukan tera ulang alat ukur timbang dan perlengkapan saja kepada pelaku usaha, dalam peran pembinaan kepada pelaku usaha diberikan sosialisasi tentang pentingnya melakukan tera ulang alat ukur timbang dan perlengkapan yang digunakan pelaku usaha karena alat ukur takar, timbang

dan perlengkapannya salah satu penunjang yang menjamin mutu barang yang dijual pelaku usaha. Tujuan diadakannya sosialisasi agar alat ukur tersebut akurat sehingga hak konsumen terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha dijalankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait hak konsumen, dilihat dari peran pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul maka hak konsumen yang telah dipenuhi yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak konsumen yang sudah terpenuhi dilihat dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul telah menjalankan peran pembinaan secara optimal.

Peran pembinaan melalui sosialisasi bertujuan agar kewajiban pelaku usaha dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban yang harus dipenuhi dilihat dari substansi peran pembinaan yaitu:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- c) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Pembinaan yang dilakukan bertujuan agar pelaku usaha memiliki kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pelaku usaha yang baik. Mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha maka dari itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi yang terjadwal setiap tahunnya di 36 pasar secara bergantian.

Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha setiap tahunnya semakin meningkat karena bermacam-macam modus baru yang dilakukan pelaku usaha dalam mengambil keuntungan yang salah. Pelaku usaha biasanya memanfaatkan magnet atau ganjalan untuk timbangan agar berat dari suatu barang ditimbang sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini penulis akan kaji diantaranya berdasarkan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha selain diatur dalam Pasal 8, juga diatur dalam Pasal 11 UUPK, yaitu:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- 1) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu;
- 2) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- 3) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- 4) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain;
- 5) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- 6) Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Dilihat dari substansinya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mengandung asas-asas yang ada dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

a) Asas manfaat

Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Penulis melihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul sudah

menjalankan peran pembinaan terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen.

b) Asas kepastian hukum

Supaya pelaku usaha dan konsumen taat pada aturan hukum dan mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum (Triana, 2015: 19). Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menjalankan perannya dalam membina melalui sosialisasi terkait tera ulang agar pelaku usaha memiliki kesadaran untuk melakukan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan pada kegiatan jual-beli.

Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pembinaan juga mengandung beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

a) Asas kemanfaatan

Kemanfaatan yang dimaksud adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul menjalankan perannya dalam membina pelaku usaha terkait kegiatan tera ulang yang harus dilakukan secara rutin oleh pelaku usaha agar alat ukur yang digunakan pelaku usaha akurat dan memberikan manfaat secara menyeluruh bagi pelaku usaha maupun konsumen.

b) Asas kepastian hukum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen saja namun juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang tidak mengerti akan aturan yang ada terkait kewajiban menera ulang alat ukur timbang dan perlengkapannya seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 pada Pasal 3 tentang Metrologi Legal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul memberikan arahan kepada pelaku usaha agar selalu patuh pada aturan yang ada di daerah maupun aturan yang ada di Indonesia. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul agar pelaku usaha dan konsumen menjalankan hak dan kewajiban semana mestinya.

c) Asas ketidakberpihakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul memiliki sifat non diskriminatif dalam melakukan tugasnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain konsumen, pelaku usaha pun perlu dilindungi dari konsumen yang tidak bertanggungjawab. Pelaku usaha dan konsumen berhak mendapat keadilan karena mendapat jaminan hukum yang harus dijalankan dengan baik.

d) Asas pelayanan yang baik

Pelayanan yang baik diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terkait kurang pahamnya pelaku usaha atau konsumen tentang adanya aturan yang berlaku. Peran pembinaan melalui sosialisasi menjadikan pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan setiap tahun di 36 pasar agar kesadaran pelaku usaha dalam melakukan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diikuti setiap tahunnya.

3. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penegakan hukum dibidang tera untuk melindungi konsumen.

a) Kendala pertama yang dihadapi Dinas Perlindungan dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha bidang perdagangan terbatas.

Kata Sumber Daya Manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Martoyo, 1992: 02). Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi (Sukirno, 2006: 172).

Pengertian sumber daya manusia dapat diartikan dalam praktiknya di Kabupaten Gunungkidul yaitu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan peran pengawasan dan pembinaan memiliki tujuan agar pelaku usaha meningkatkan kualitas dalam kegiatan perdagangan dengan cara melakukan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya.

Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul. Kewajiban pelaku usaha yang termasuk dalam peningkatan kualitas diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 7 huruf b tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Kurangnya kesadaran pelaku usaha jika dilihat dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman termasuk dalam budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum (*legal culture*) merupakan suatu elemen yang erat terhadap sikap dan nilai sosial (Friedman, 2017: 6-17). Hal ini dilihat dari sikap pelaku usaha yang acuh akan kegiatan tera

ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sikap sosial yang terjadi dalam budaya Indonesia.

Pemerintahan yang baik harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dilihat dari substansinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan solusi terkait kendala kurangnya kualitas sumber daya manusia termasuk dalam asas, yaitu:

1) Asas kepentingan umum

Asas mencerminkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan peran pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk mensejahterakan dan memberikan manfaat umum bagi pelaku usaha dan konsumen.

2) Asas pelayanan yang baik

Pelayanan yang baik telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peran pembinaan supaya pelaku usaha paham dan dapat menjalankan kegiatan perdagangan sesuai aturan yang ada.

Asas yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait tujuan sosialisasi terhadap kualitas pelaku usaha yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum

dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum yang ada dan memperoleh keadilan.

b) Sarana dan prasarana pasar yang belum memadai.

Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu proses. Sarana dan prasarana dibutuhkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pembinaan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul tidak memiliki sarana yang tetap untuk kegiatan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. Pelaku usaha yang ingin menera ulang alat ukur yang memiliki ukuran besar dan tidak dapat dibawa kemana-mana memiliki tingkat kesulitan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Kurangnya sarana dan prasarana yang dialami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul belum secara maksimal dalam menjalankan asas umum pemerintahan yang baik. Asas pelayanan yang baik sebaiknya menjadi dasar dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Gunungkidul terkait tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya.

- c) Belum terbentuknya UPT Kemetrolagian yang merupakan salah satu syarat memperoleh cap tera dimana harus tersedia ruang servis, laboratorium dan perkantoran.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul belum memiliki UPT Kemetrolagian daerah. Peran pengawasan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul masih bekerjasama dengan UPT Kemetrolagian Bantul. Petugas penera Kabupaten Gunungkidul merupakan utusan dari UPT Kemetrolagian Bantul karena minimnya sumber daya manusia.

- d) Kecurangan terhadap alat ukur takar, timbangan dan lain sebagainya.

Hal ini dibuktikan dengan kegiatan tiap tahun yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten terkait pengawasan di 36 pasar. Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjelaskan ketentuan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 membuat konsumen merasa dirugikan. Hak konsumen yang harus dipenuhi terkait dengan kendala kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha termasuk dalam teori sistem budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum (*legal culture*) adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Friedman, 2017: 6-7). Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha merupakan cerminan budaya hukum karena pemikiran sosial yang sempit akan pengetahuan yang tidak paham terkait aturan yang sudah dibuat.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul sangat klasik, dilihat dari prinsip untuk melandasi sebuah konsep tata pemerintahan yang baik yaitu beragam, mulai dari instansi satu ke instansi lain dan dari satu pakar ke pakar lainnya (Fatmawati, 2011: 98-99). Prinsip yang menjadi landasan *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Penanganan dalam kendala yang dihadapi merupakan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dan Petugas Penerima sebagai menteri teknis yang berkesinambungan sebagai partner kerja bukan sebagai *single fighter* dari pemerintah saja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul jika ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik telah sesuai dengan asas pelayanan yang baik.

Asas pelayanan yang baik dalam pemerintahan yang baik ialah pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan mencakup kehidupan banyak orang (Ridwan, 2011: 244). Pelayanan yang diberi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul kepada pelaku usaha dengan cara memberikan informasi yang benar melalui sosialisasi terkait peneraan alat ulang. Tujuan pelayanan agar pelaku usaha tidak salah dalam menggunakan alat takar, timbang dan perlengkapannya secara benar sesuai prosedur.

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- 1) Struktur hukum (*legal structure*);
- 2) Substansi hukum (*legal substance*);

3) Budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum merupakan salah satu dasar dari sistem hukum dimana sistem hukum secara struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Substansi hukum merupakan bagian lainnya yang tersusun dari peraturan yang ada dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berlaku. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum merupakan bagian yang sangat erat terhadap sikap dan nilai sosial (Friedman, 2017: 6-17).

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul secara sistem hukum masuk kedalam unsur dari budaya hukum (*legal culture*) dan substansi hukum (*legal substance*). Kendala yang terjadi di masyarakat Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari segi hukum diakibatkan dari pola pikir masyarakat yang kurang paham terkait aturan. Pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan harus paham terkait aturan-aturan yang ada seperti aturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam mengubah pola pikir masyarakat pada aturan sosial menjadi sebuah tuntuan agar masyarakat menaati sebuah peraturan yang telah mengalir pada satu sistem. Struktur hukum berperan untuk menjalankan kekuatan sosial yang telah diatur sebelumnya.

Budaya hukum yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul lebih sering melalui kegiatan sosialisasi dengan memberikan materi terkait aturan yang ada tentang kegiatan tera ulang alat ukur timbang dan perlengkapannya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul menyebabkan budaya hukum menjadi kurang baik. Kesadaran masyarakat terkait kepekaan mengikuti sosialisasi yang diadakan dapat merubah budaya hukum menjadi lebih baik.

Sistem hukum mengenai unsur substansi hukum dapat diartikan dalam peraturan daerah apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan izin kepada petugas penera. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, dan memberikan penanganan pengaduan terhadap masyarakat secara langsung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul. Keluhan terkait konsumen laporan diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Ketiga teori tersebut dapat dilihat kelemahan dalam sistem hukum yaitu pada unsur budaya hukum (*legal culture*). Unsur budaya hukum dikatakan lemah karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul. Faktor lain terkait lemahnya substansi hukum dikarenakan tidak adanya wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terkait penindakan maka Dinas Provinsi belum tentu dapat mengetahui keluhan yang diadukan di Kabupaten Gunungkidul.

Hal ini yang dapat menyebabkan substansi hukum yang tidak seimbang dengan kenyataannya dan membuat aturan yang telah berlaku di Kabupaten Gunungkidul tidak dapat berjalan dengan seimbang. Ketidaksadaran pelaku usaha dalam kewajiban yang harus dipenuhi menjadi tidak berjalan lancar dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan menjadi akibat konsumen mengalami kerugian.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melindungi konsumen sudah dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan. Pertama, pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terhadap alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan untuk melakukan tera ulang yang dilakukan oleh petugas penera yang tersebar di 36 pasar yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul melakukan pembinaan melalui sosialisasi terkait pentingnya tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya. Sosialisasi dilakukan satu tahun sekali di 36 pasar yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Ketidakoptimalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dikarenakan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha belum dilakukan secara maksimal oleh pelaku usaha.
- b) Hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan terbatas, sarana dan prasarana pasar yang belum memadai, belum

terbentuknya UPT Kemetrolagian yang merupakan salah satu syarat memperoleh cap tera dimana harus tersedia ruang servis, laboratorium dan perkantoran, dan kecurangan terhadap alat ukur takar, timbangan dan perlengkapannya. Kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul termasuk salah satu hambatan yang dihadapi selama berjalannya kegiatan tera ulang alat ukur timbang, takar dan perlengkapannya yang ada di daerah Gunungkidul.

2. Saran

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul harus lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang beredar pada 36 pasar di Kabupaten Gunungkidul. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini harus lebih intensif melakukan pengawasan ke lapangan. Bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap alat timbang apabila tidak dapat dibina maka harus ada sanksi bukan hanya sekedar menegur namun memberikan denda administrasi agar tidak ada keluhan dari konsumen di Kabupaten Gunungkidul.

- b) Pelaku usaha harus lebih intensif lagi dalam pelaksanaan tera ulang, supaya pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya untuk menjaga kualitas mutu barang yang dijual.
- c) Konsumen harus lebih diperhatikan dalam mengkonsumsi barang yang dijual pelaku usaha agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Friedman, Lawrence. (2017). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group
- Koencoro, Diana Halim. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Manthis, Robert L. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Jakarta: Salemba Empat
- Martoyo, S. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Ridwan, HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tangdilintin. (2008). *Pembinaan Generasi Muda*. Yogyakarta: Kanisius

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Metrologi Legal

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

C. Jurnal

Fatmawati. (2011). Kemitraan dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajah Toritik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2)

Mansyur, Ali., dan Rahman, Irsan. (2015). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11(1)

Mujiatun, Siti. (2014). Peran Pemerintah tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Analytica Islamica*, 3(1)

Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS* 3(9)

D. Skripsi

Ayu, Wandira. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika dan Elektronika yang Tidak Disertai dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia*. Skripsi. Universitas Hasanuddin

Triana, Cahaya Setia Nuarida. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman